

Jurnal SUWA
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Vol. XII, No. 1, April 2014

Daftar Isi

Autonomi Daerah: Smart Unitary State (Study Negara Kesatuan Indonesia) <i>Alfian, S.HI., MA</i>	1-10
The Role of International Actor in Aceh Peace and Post-Conflict Process <i>Zulham, BA., MA & Muhammad Fazil, M.Soc.Sc</i>	11-22
Memahami Perspektif Media Massa Indonesia dalam Mewartakan Konflik Politik di Indonesia (Kasus Pemberitaan Kematian Bantaqiah CS) <i>Dr. M. Nazaruddin</i>	23-39
Kajian Netralitas Industri Media dalam Pemilu 2014 <i>Kamaruddin, S.Sos., M.Si</i>	41-61
Kajian Kritis Komunikasi Sosial Pembangunan (Studi Komunikasi Sosial Pembangunan Pemerintah Aceh; Strategi Menuju People Centred Development) <i>Subhani, S.Sos, M.Si, Kamaruddin, S.Sos, M.Si, Ainol Mardhiah, S.Ag, M.Si</i>	63-85
Kebijakan Publik Merupakan Salah Satu Pilar dalam Mewujudkan Good Governance di Setiap Negara <i>Dr. Rasyidin, S.Sos., MA</i>	87-102
Komunikasi Interpersonal Sebagai Basic Skill Individu <i>Dwi Fitri, S.Sos., MA</i>	103-112

Peran Opinion Leader dalam Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen <i>Nur Hafni, S.Sos., MPA & Rahmad, S.Sos., MAP</i>	113-130
Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara <i>Andria Zulfa</i>	131-150
Riwayat Hidup Penulis	152-154

**MEMAHAMI PERSPEKTIF MEDIA MASSA
INDONESIA DALAM MEWARTAKAN KONFLIK
POLITIK DI INDONESIA
(KASUS PEMBERITAAN KEMATIAN BANTAQIAH CS)**

Oleh : M. Nazaruddin

Abstrak

Tulisan ini hendak berbicara tentang perspektif media massa dalam pemberitaan mengenai kematian Bantaqiah cs. Proses pemberitaannya sendiri tidak dapat begitu saja dilepaskan dari unsur konteks sosial politik ketika penulisan berita ini diturunkan. Hal tersebut telah menggiring proses pemberitaan tersebut lebih bersifat subjektif dan lebih memihak pada status quo. Analisis isi merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami isi pemberitaan media massa tersebut.

Kata kunci: Perspektif media massa, konteks sosial politik dan kematian Bantaqiah cs.

1. Pengantar

Bila ditilik dari namanya yaitu 'media massa' seolah-olah mengandung makna bahwa masalah sebagai pemilik media, yang berarti semua massa atau masyarakat memiliki posisi yang sama dalam hal aksesibilitas terhadap media. Tetapi dalam kenyataannya suatu media massa pasti dikuasai oleh kelompok-kelompok dominan dalam suatu masyarakat.

Kelompok-kelompok dominan itulah yang sesungguhnya mengontrol bagaimana dan kemana seharusnya suatu pewacanaan media diarahkan. Posisinya adalah sebagai media transmisi kelompok dominan untuk membentuk dan menguasai opini publik. Jadi posisinya tidaklah sebagaimana namanya secara harfiah.

Muatan ideologis dan pragmatis dari kelompok dominan justru semakin mudah diransmisikan kepada massa atau orang banyak. Negara (kelompok politik dominan) dan pemilik modal dalam konteks ini adalah dua agen yang sangat diuntungkan oleh keberadaannya suatu media massa. Karena kedua elite sosial itulah pemegang kendali utama terhadap suatu media massa. Kecenderungan ini terutama dialami oleh negara-negara ketiga.

Kalaupun aksesibilitas tetap tersedia untuk massa bagi suatu media massa terutama media massa di dunia ketiga untuk ikut terlibat dalam pembentukan opini publik atau counter opini publik misalnya. Akses yang mereka miliki merupakan kadar akses yang merupakan pemberian dari kedua kelompok dominan. Atau malah dengan kecanggihan freemium tertentu akses yang diberikan kepada massa itu hanya akses untuk kepentingan kontestasi yang menggunakan media massa sebagai arena memenangkan "perang" kelompok dominan.

Realitasnya untuk kasus media massa di Indonesia baik di zaman Orde Baru maupun Orde Reformasi atau bahkan zaman periode awal reformasi media Indonesia dalam freemium pewartannya masih memiliki kecenderungan didominasi oleh kepentingan kelompok dominan baik negara atau pemodal baik untuk membela kepentingan ideologi maupun kepentingan pragmatis dari kedua kelompok dominan. Kecenderungan ini terutama masih terlihat dalam konteks ketika media massa Indonesia mewartakan berita-berita seputar konflik Aceh masih kerkecamuk di masa lalu. Salah satu yang diambil sebagai contoh misalnya bagaimana media massa di Indonesia memberitakan seputar tragedi kematian Bantaqiah dan sahabat-sahabatnya misalnya.

2. Metode Pembahasan

Pembahasan kajian ini didasarkan bahan-bahan kepustakaan dan berita dari media massa seperti *Kompas*, *Republika*, *Serambi Indonesia*, dan *Kontras* yang khusus memuat berita-berita tentang peristiwa kematian Bantaqiah cs. pada Juli 1999. Masa pemberitaan tentang kematian Bantaqiah cs terjadi dalam rentang waktu 23 Juli 1999 sampai dengan Mei 2000 dipilih sebagai bahan kajian.

Kompas dan *Republika* menjadi pilihan sumber data karena di samping keduanya dipandang mewakili media nasional, keduanya juga termasuk *high quality newspaper* (Abrar,1998). Sementara *Serambi Indonesia* dan *Kontras* dipandang dapat mewakili media daerah dan cenderung lebih mewarnai perspektif daerah dalam pemberitaannya.

Semua pemberitaan dari keempat media yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan secara selektif untuk kemudian dijadikan data penelitian. Data-data tersebut didapatkan melalui koran yang sudah dikumpulkan baik dari pustaka, koleksi pribadi, litbang atau melalui data koran yang ada di internet. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi).

3. Memahami Perspektif Media Massa di Indonesia

Dalam alam kehidupan bernegara kita, tidak terlalu aneh kalau kita mendengar istilah pers atau media Pancasila. Karena di samping istilah pers Pancasila, kita sudah terbiasa dengan istilah-istilah lain yang berembel-embel Pancasila seperti ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, pemuda Pancasila, moral Pancasila.

Pada era kolonialisme masih bercokol di Nusantara, kita mengenal istilah pers perjuangan, yang lahir dari kegandrungan dan cita-cita para insan pers terhadap ideologi kemerdekaan. Sebutan pers perjuangan sudah sepantasnya disandang pers Indonesia ketika itu karena keberadaannya dibangun atas dasar ideologi dan cita-cita untuk mendidik masyarakat ke arah sikap merdeka dengan dukungan penuh dari komunitas wartawan yang sekaligus merangkap sebagai pejuang. Istilah pers perjuangan merupakan konsekuensi dari orientasi yang mereka kembangkan yang lebih bersifat kritis terhadap negara kolonial dan afirmatif terhadap masyarakat (Siahaan dan Purnomo, 1993).

Ketika era industrialisasi melanda negeri kita, dunia pers kita pun semakin menunjukkan wajah sebagai sebuah industri. Hal ini ditandai dengan semakin padat modal dan berkembangnya standar-standar profesionalisme pers kita menuju industri pers. Kecenderungan dominan yang muncul kemudian adalah kecenderungan pers yang berorientasi pada pasar. Pasar di sini merujuk pada kelas menengah, sehingga pada perkembangannya pers kita lebih berpretensi untuk menjadi pers budaya, tepatnya pers yang mengekspresikan budaya kelas menengah dan pop. Pada masa ini orientasi pers yang kritis terhadap industri, *state* dan afirmatif terhadap *society* menunjukkan kegoyahannya (Sudibyo, 1999).

Menurut De Rooy dalam Oetama (1987), pers suatu negara akan selalu dipengaruhi oleh pikiran dasar dan orientasi pokok yang sedang disebarluaskan dalam masyarakatnya. Jika paradigma yang dominan adalah paradigma pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi pada negara-negara sedang berkembang, keberadaan pers tidak ditentukan

oleh paradigma yang dianut oleh pengelola media melainkan lebih banyak ditentukan oleh paradigma yang dominan dalam sistem politik di mana mereka berada (Siregar, 1992), maka segala sumberdaya pers akan diarahkan untuk mendukung *mainstream* kebijakan negara dalam bidang ekonomi pertumbuhan.

Sejak lahirnya Orde Baru pikiran dan orientasi pokok bangsa Indonesia dikerahkan kepada pembangunan nasional, yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Formulasi pembangunan yang ideal di Indonesia adalah pembangunan yang berdasarkan pada ideologi Pancasila. Pembangunan pada dasarnya juga merupakan usaha untuk mentransformasikan masyarakat ke arah tertentu. Dalam perspektif ini, pers nasional diharapkan berperan nyata dalam proses transformasi sosial ke arah terbentuknya masyarakat yang berdasarkan Pancasila (Oetama, 1987).

Menurut Heru Nugroho (2000), pembangunan yang pada dasarnya dianggap sebagai sarana transformasi sosial dari kondisi tertentu ke kondisi yang lebih baik atau dalam pengertian yang lebih jamak sebagai sarana pembebasan manusia dari kemiskinan dan bahkan kata pembangunan itu sendiri telah cenderung menjadi mitos dan sakralisasi telah mengalami distorsi makna dalam implementasinya. Proses pembangunan telah mengizinkan pengorbanan-pengorbanan berbagai dimensi nilai-nilai kemanusiaan seperti intensitas komunikasi politik dan demokrasi sosial. Demi mencapai pertumbuhan ekonomi, maka stabilitas politik dan depolitisasi merupakan syarat mutlak yang diperlukan sehingga kontradiksinya adalah bahwa pembangunan sendiri justru semakin menjauhkan masyarakat dari demokrasi dan kebebasan politik.

Pers kita adalah pers Pancasila atau pers pembangunan yang selalu berada dalam kegamangan makna ketika harus dihadapkan pada dua paradigma normatif media massa, yaitu antara berdiri pada posisi libertarianisme atau pada posisi otoritarianisme yang pilihan paradigma ini menentukan seluruh bangunan konseptual yang digunakan dalam melihat setiap indikasi bagi kebebasan pers.

Masing-masing paradigma membawa wacana dengan makna kebenarannya sendiri. Siregar (1999) menyebutkan bahwa dalam menggunakan paradigma, seseorang hanya dapat melakukan pemindahan. Artinya, jika harus mengambil suatu paradigma, dia harus meninggalkan paradigma sebelumnya. Sebagai yang mendasari bangunan konseptual, maka paradigma pada dasarnya tidak dapat dikompromikan. Begitu ada upaya untuk mengkompromikan paradigma yang satu dengan yang lainnya, maka akan terjadi komplikasi. Yang dapat dilakukan hanya memperbaiki secara teknis bentuk pilihan paradigma yang sudah ada. Dengan kata lain, meningkatkan atau memperluhur pada tataran etis dari setiap tindakan di dalam bangunan konseptual yang sudah ada.

Sepanjang era Orde Baru terjadi proses sistematis dalam penghancuran kebebasan dan hak masyarakat yang membawa implikasi terhadap kebebasan pers. Tiadanya kebebasan pers bukan hanya melalui ketentuan lisensi atau

izin terbit oleh penguasa, tetapi melalui seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat (Siregar, 1999).

Menurut Mallarangeng (1990), bentuk masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat Pancasila (yang bukan masyarakat Kapitalis Liberal dan bukan masyarakat Sosialis Komunis). Mengikuti harapan inilah bentuk pers yang diinginkan adalah pers pancasila (bukan pers Liberal atau pers Komunis). Dengan begini, yang diharapkan adalah penghindaran dari persaingan bebas dan posisi *watch dog* yang menjadi ciri pers liberal, serta subsidi modal dan posisi sebagai organ pemerintah yang menjadi ciri pers Komunis. Terminologi pers pancasila dapat dilihat sebagai cermin betapa besarnya kemauan politik dan harapan ideologis ke arah tertentu yang harus dituju oleh pers.

Sepadan dengan itu Siregar (1999) menyebutkan bahwa proses ini ditandai oleh struktur sosial dengan kekuasaan negara bersifat hegemonik dan korporatis ala fasisme. Seluruh hubungan institusional secara vertikal berdasarkan pola pusat dan periferi, dengan pelumpuhan daya periferi. Dalam politik misalnya dijalankan politik massa mengambang, sehingga peran politik dijalankan secara elitis, dan elit politik dikendalikan secara sentralistis dan bersifat *top down*. Di satu pihak informasi bagi elit sosial disediakan secara tertutup dalam institusi masing-masing yang sudah terkooptasi dalam sistem negara korporatis. Pada pihak lain informasi faktual media massa difilter untuk kepentingan penguasa negara.

Ignas Kleden (1987) menyebutkan bahwa konsep pers Pancasila yang “bebas dan bertanggung jawab” memberi kesan bahwa Indonesia berusaha menempuh jalan tengah atau via media antara pers liberal dan pers yang hidup di negara-negara totaliter. Pers Indonesia berusaha untuk menjadi mitra pemerintah dengan tetap mempertahankan fungsi kontrol sosialnya. Dengan penggabungan ini diharapkan unsur-unsur yang terbaik yang muncul, tetapi yang terjadi sesungguhnya malah sebaliknya. Kleden memberi contoh penggabungan sistem sosialis dan kapitalis dengan mengharapkan penggabungan unsur pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Celakanya yang terjadi kemudian adalah ketidak merataan (sistem kapitalis) dan ketidak bebasan (sistem sosialis).

Persoalan krusial dalam perbincangan tentang pers pembangunan (Pancasila) ini adalah persoalan kebebasan pers. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, peristiwa atau persoalan apa saja yang boleh atau tidak boleh untuk diberitakan, serta sampai seberapa jauhkah peristiwa dan persoalan tertentu dapat dijadikan bahan berita. Apakah peristiwa atau persoalan itu dapat dikupas seluruhnya, mencakup seluruh spektrum yang berkaitan dengannya, secara lugas dan egaliter? Atau hanya boleh dibahas seperlunya, sekadar urutan kejadian, hanya boleh secara sumir sehingga khalayak dapat mengetahui tentang terjadinya peristiwa tertentu namun tidak sampai selengkap dan seutuhnya apalagi disertai warna-warni? (Oetama, 1987)

Paradigma pers pembangunan mengharuskan pers senantiasa menyadari bahwa pemberitaan masalah peka tertentu dapat menjadi *casus belli* terjadinya eskalasi dalam masyarakat. Pers perlu mengendalikan diri dan senantiasa mengontrol format dan nada penyajian berita, sehingga suatu informasi dapat sampai ke masyarakat tanpa menyebabkan suatu eskalasi krisis. Di sisi lain pers juga tetap perlu memperhatikan fungsi sosialnya. Pers tetap berkewajiban menyediakan forum bagi masyarakat untuk mengenali, mendiskusikan dan merekonstruksi realitas atau persoalan-persoalan yang signifikan (Sudibyo, 1999)

Dengan demikian, tekanan pers pembangunan adalah pengendalian penyajian realitas, dan bukannya penafian atau penggelapan realitas secara total. Pendekatan yang dominan dalam pers pembangunan bukannya “jangan diberitakan”, tetapi “beritakanlah dengan cara yang benar” (Oetama, 1987).

4. Media Massa dan Konflik.

Sudah umum dipahami bahwa antara media massa dan peristiwa konflik mempunyai hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Lebih lanjut mengenai hal ini Tichenor dkk. (1980) mengidentifikasi bahwa sebuah konflik bagaimana pun membutuhkan pemberitaan media. Pihak-pihak yang bertikai membutuhkan publikasi oleh media atas klaim-klaim mereka. Khalayak juga sangat tergantung pada pemberitaan media tentang sebuah peristiwa konflik untuk mengetahui perkembangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Goerge Wang. Ia menyebutkan bahwa konflik selalu dianggap mempunyai nilai berita yang tinggi sehingga keterlibatan media massa dalam sebuah konflik menjadi suatu keniscayaan jurnalistik (Sudibyo, 2001).

Persoalannya kemudian adalah bagaimana media massa meliput berita di wilayah konflik. Karena disadari bahwa wilayah konflik yang brutal dan anarkhis, sangat rawan bagi keselamatan jiwa jurnalis. Tidak ada jaminan semua pihak yang bertikai mau menghormati konvensi tentang perlindungan keselamatan jiwa jurnalis dalam meliput konflik. Jurnalis juga dihadapkan pada keterbatasan akses ke sumber-sumber konflik, kurangnya pemahaman atas kondisi sosial budaya setempat, ketergantungan terhadap sumber-sumber resmi militer (Sudibyo, 2001). Dihadapkan pada suatu konflik, kadang kala media juga terjebak pada personalisasi dan keberpihakan pada kekuatan politik tertentu sehingga menyebabkan keobjektifan media menjadi lemah. Pada tataran ini media berada dalam posisi yang gamang, di satu pihak ia harus berlaku objektif sebagai realisasi dari nilai-nilai jurnanisme, sementara pada saat yang sama ia juga terikat dengan kungkungan nilai-nilai ideologi politik lingkungannya yang harus dibela.

Sehingga apa yang kita ketahui tentang perang (konflik) tersebut didasarkan pada cara bagaimana media tersebut sebagai institusi dan jurnalis sebagai individu melakukan investigasi, memilih dan mempresentasikan berita tentang perang itu (loeffelholz, 2002).

Media massa sebagai media komunikasi publik berkaitan dengan pemberitaannya mengenai sebuah peristiwa konflik pada satu sisi bisa sebagai media komunikasi perang. Ketika krisis menegang dan bahkan muncul ke permukaan menjadi konflik yang terbuka hingga benturan kekerasan atau perang ia dapat memainkan peran meningkatkan eskalasi konflik. Sementara di sisi yang lain ketika krisis berlalu, konflik menurun, hingga kembali dalam kondisi normal, komunikasi damai bisa menurunkan konflik. Dalam tiap tahapan komunikasi bisa memperbesar atau sebaliknya menurunkan eskalasi konflik (Trijono, 2002).

Masih menurut Trijono (2002) komunikasi politik dalam situasi krisis perang dan konflik dapat berperan sebagai berikut: pertama, bagaimana proses komunikasi dapat meningkatkan dan menurunkan dinamika perang atau konflik pada umumnya.

Situasi konflik atau perang paling tidak menurut Mitchell (1981) diliputi oleh tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu: pertama, konteks atau situasi konflik. Dua, persepsi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, baik pihak langsung maupun pihak tidak langsung. Tiga, perilaku pihak-pihak yang berkonflik selama konflik berlangsung. Keterkaitan antara ketiga elemen yang bisa mempengaruhi konflik itu bermula ketika terjadinya perubahan-perubahan dalam realitas struktur dan kultur dalam masyarakat sehingga menciptakan kesenjangan atau ketimpangan struktural-kultural yang mencolok. Situasi demikian mudah menciptakan situasi saling curiga, tidak percaya, ketegangan dan sikap permusuhan antar kelompok dan akhirnya mudah menjadi perilaku konflik terbuka, bentrok, perang dan kekerasan. Ketika perilaku konflik berlangsung, perang terjadi, hal itu kembali akan mempengaruhi sikap permusuhan menjadi semakin intensif, khususnya jika perilaku konflik yang berlangsung telah menimbulkan kekerasan, kerusakan atau korban yang lebih luas, baik di kalangan pihak-pihak yang berkonflik maupun kalangan luas di luar arena konflik (Trijono, 2002).

Dalam situasi konflik yang demikian, ketersediaan informasi yang seimbang, proporsional, dan netral pada umumnya sangat langka dan menurun drastis. Dalam keadaan yang krisis demikian, komunikasi pun mengalami krisis yang hebat. Jenis komunikasi yang ada dalam situasi demikian hanya jenis komunikasi perang karena langkanya informasi yang seimbang dan proporsional tentang situasi, persepsi, dan perilaku konflik yang ada (Trijono, 2002).

Terjadinya tragedi pembantaian Bantaqiah dan para santrinya oleh pihak militer, secara umum dipicu oleh langka dan tidak proporsionalnya informasi yang seimbang tentang situasi, persepsi, dan perilaku konflik Aceh pada umumnya dan keberadaan kelompok bantaqiah pada khususnya. Tragedi itu diawali oleh adanya informasi dari pihak intelijen yang menyebutkan bahwa kelompok Bantaqiah adalah kelompok GPK dan menyimpan banyak senjata api. Berangkat dari informasi yang tidak pernah dibuktikan terlebih dahulu

dan bahkan sampai pada masa kasus ini dipengadilankan keberadaan senjata api dan keterlibatan Bantaqiah sebagai GPK tidak pernah terbukti, itulah yang akhirnya melahirkan sebuah kebijakan resmi militer untuk menghabisi kelompok Bantaqiah.

Kedua, informasi dan liputan macam apa yang biasanya tersedia dan berkembang dalam situasi konflik. Trijono (2002) menyebutkan bahwa media massa mempunyai peran sangat besar dalam konflik atau sebaliknya mencegah konflik dan mendorong perdamaian. Dari segi kuantitas, informasi yang tersedia bisa dikatakan *overload*, khususnya berita-berita yang menyangkut konflik terbuka, perang, dan kekerasan yang sedang berlangsung. Media massa biasanya menjadikan berita-berita semacam itu secara umum sebagai *headline* dan berita utamanya karena pada umumnya publik memang menyukai berita-berita sensasional tentang kekerasan. Meskipun dari sisi kuantitas, pemberitaan mengenai konflik cukup banyak, namun kualitas pemberitaannya bisa dikatakan sangat rendah dan cenderung memperburuk situasi. Sangat langka kita bisa menemukan adanya informasi yang seimbang dan proporsional tentang konflik.

Sejauh ini, media massa bisa dikatakan cenderung meliplt berita-berita konflik pada permukaan dan secara sepotong-sepotong, hanya pada aspek perilaku konfliknya saja atau aspek-aspek konflik kasat mata dan peristiwa konflik yang sangat dramatis yang mendapat perhatian terbesar untuk diliput. Seperti perilaku membunuh, membantai kelompok tertentu, menembak mengebom, pesawat membombardir lawan, lawan membalas dengan serangan anti rudal, dan sebagainya. Liputan mereka kebanyakan bukan pada keseluruhan fakta tentang dimensi-dimensi konflik yang mencakup situasi dan persepsi masing-masing pihak tentang konflik. Aspek lain dari konflik kekerasan, seperti situasi yang menjadi akar penyebab konflik dan persepsi berbagai pihak tentang konflik tidak mendapat perhatian yang berarti dari media, meski hal itu sangat penting untuk diketahui publik. Selain bersifat permukaan, laporan media massa dan laporan resmi pemerintah tentang konflik di Indonesia juga seringkali bias dan tidak proporsional. Konflik hanya dilihat seolah-olah hanya sebagai peristiwa kecelakaan yang tragis, kesalahan prosedur atau efek samping dari suatu kebijakan, bukannya sebagai peristiwa sengaja yang secara sistematis melekat di dalam bekerjanya sistem politik, sebagai suatu gejala yang memiliki banyak aspek, dimensi, dan punya akar penyebab dan pola tertentu yang bisa dicegah dan diatasi (Trijono, 2002).

Peristiwa Bantaqiah yang merupakan rentetan panjang dari konflik Aceh misalnya, pemberitaannya cenderung pada tataran dan penggambaran bagaimana pembantaian tersebut terjadi, berapa orang yang mati, kapan dan di mana pembantaian itu terjadi dan seterusnya. Media tidak mengulas mengapa peristiwa tersebut harus terjadi. Media massa tidak memberitakan secara tuntas apa dan bagaimana akar persoalan yang sesungguhnya sehingga peristiwa yang mengesankan tersebut harus terjadi. Media massa tidak mengejar informasi lebih jauh apakah tragedi tersebut bagian dari upaya "pemeliharaan" konflik

Aceh dan upaya sistematis yang melekat pada kebijakan politik tertentu. Mereka cenderung berhenti pada fakta dan informasi yang kasat mata saja.

Ketiga, bagaimana krisis komunikasi berlangsung dan informasi cenderung dipolitisir dalam situasi perang. Informasi tentang konflik yang tersedia dalam situasi krisis dan perang umumnya cenderung dipolitisir oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan politik dan kepentingan mereka. Hal itu terjadi karena terjadi kecenderungan sangat terbatas dan langkanya ketersediaan informasi yang seimbang dan proporsional tentang konflik dalam situasi krisis sehingga informasi yang ada mudah dimanipulasi oleh pihak-pihak berkonflik untuk kepentingan mereka (Triyono, 2002).

Sejalan dengan itu, Eriyanto (1999) menyebutkan bahwa dalam suatu konflik, pada dasarnya media massa adalah arena yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak yang terlibat berusaha mendapatkan perhatian agar diliput media massa yang tujuan akhirnya adalah menonjolkan penafsiran masing-masing agar lebih diterima oleh khalayak. Setiap pihak berusaha menonjolkan basis penafsiran, klaim, atau argumentasi masing-masing berkaitan dengan persoalan yang diberitakan media dengan mempertajam kemasam tertentu dari sebuah isu.

Dalam kasus Bantaqiah khususnya dan konflik Aceh pada umumnya, media massa menjadi arena perang retorika atau perang klaim antara militer, GAM, pemerintah, aktifis sosial, LSM, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan tertarik dengan masalah sosial tersebut. Perang klaim tersebut dapat mengarah pada terjadinya definisi atau pemahaman tentang realitas sosial sepihak. Hal ini terjadi jika media hanya memberi peluang kepada satu pihak untuk menonjolkan interpretasi mereka dalam wacana berita yang terbentuk. Menurut Hidayat (1999), dalam menjalankan fungsinya media menghadapi banyak persoalan. Pertama, tidak semua unsur yang berkonflik mempunyai akses yang sama pada media. Kedua, tidak semua berita atau isu yang sebenarnya penting diberitakan oleh media (Eriyanto, 1999). Karena beberapa kendala informasi tentang konflik inilah akhirnya membawa sebuah pemberitaan media pada titik memprihatinkan dan dalam kadar tertentu hal tersebut bisa berimbas pada wilayah konflik itu sendiri.

Berkaitan dengan persoalan di atas, Triyono (2002) menyebutkan bahwa untuk membuat sebuah keputusan yang memadai dalam penanganan, pencegahan, dan penyelesaian konflik, informasi yang jelas dan akurat tentang konflik yang terjadi sangat dibutuhkan. Tanpa informasi yang cukup, memadai, akurat, dan jelas maka kemungkinan penanganan, pencegahan, dan penyelesaian konflik yang efektif sangat sulit diharapkan. Untuk itu, peran media massa sebagai media komunikasi massa sangat dibutuhkan terutama mengenai berita-berita tentang konflik dan kekerasan, untuk menyebarkan informasi yang objektif, proporsional, akurat, seimbang atau dua sisi dan adil sangat dibutuhkan oleh publik karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab jurnalisme yang bertanggung jawab.

5. Berita Tentang Kematian Bantaqiah cs.

Dari kesemua jumlah berita yang telah dimuat oleh ke empat media massa tersebut, pemberitaannya tentu tidak bisa dilepaskan dari sumber berita. Media massa dalam menulis beritanya sangat tergantung pada sumber berita. Idealnya sebuah media massa tidak bisa mengarang-ngarang suatu berita tanpa sumbernya yang jelas, hanya saja mungkin dalam penyajiannya media massa lebih menekankan pada sumber berita tertentu. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Negrine (Sudiby,2001), harus disadari bahwa sumber berita bukan sekedar objek yang diwawancarai. Sumber berita juga aktor yang turut mendefinisikan realitas. Dengan mewawancarai sumber berita tertentu, pada dasarnya media memberikan kesempatan kepada seorang aktor sosial untuk mendefinisikan realitas dengan cara dan konsepsi dia.

Tabel Satu
Sumber Berita
Tahun 1999

	Kompas	Republika	Serambi	Kontras
Militer	2	3	2	2
GAM	x	x	1	1
Korban Yang Selamat	x	x	1	1
Tokoh Masyarakat	1	1	x	2
Keluarga Korban	x	x	3	4
Masyarakat Sekitar	x	1	7	3
Kalangan LSM	2	3	2	2
Kalangan Mahasiswa	2	x	1	1
Kalangan Luar Negeri	x	x	2	2
Jumlah	7	8	19	18

Dari tabel dua di atas, meskipun ke empat media itu cenderung menggunakan sumber beritanya tidak hanya dari sumber resmi militer tapi juga dari sumber-sumber non militer, namun masih terlihat adanya perbedaan jumlah dan komposisi sumber berita dari tiap-tiap media massa itu dalam meliput berita tentang kematian Bantaqiah cs.

Dari ke semua sumber berita di atas, dalam menanggapi kasus kematian Bantaqiah cs tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok penilaian. Pihak militer di satu sisi mengatakan kematian Bantaqiah cs tersebut terjadi dalam suatu kontak senjata. Sementara dari pihak non militer dari berbagai komponen

masyarakat sipil di sisi yang lain menyebutkan bahwa kematian Bantaqiah cs tersebut tidak terjadi dalam suatu kontak senjata, melainkan penembakan sepihak oleh pihak militer terhadap masyarakat sipil.

Dalam periode penelitian yang dilakukan menyangkut tragedi Bantaqiah khususnya berkenaan dengan penyebab kematian Bantaqiah cs, Kompas mendasarkan sumber beritanya pada pihak militer lebih kurang ada dua sumber. Republika lebih kurang ada tiga sumber. Serambi Indonesia lebih kurang ada dua sumber. Kontras lebih kurang ada dua sumber. Dalam pemberitaannya ke empat media tersebut, sesuai dengan sumber beritanya yakni pihak militer, menyebutkan bahwa kematian Bantaqiah ca tersebut terjadi dalam suatu kontak senjata.

Di samping sumber-sumber berita dari pihak militer, ke empat media itu juga menurunkan beritanya dari sisi non militer sebagaimana terlihat pada tabel dua di atas. Kompas mendasarkan sumber beritanya pada tokoh masyarakat lebih kurang satu sumber, pada kalangan LSM lebih kurang dua sumber, pada kalangan mahasiswa lebih kurang dua sumber. Dari tabel dua terlihat Kompas tidak mendasarkan sama sekali sumber pemberitaannya pada pihak GAM, korban yang selamat, keluarga korban, masyarakat sekitar, dan pihak luar negeri.

Republika juga mendasarkan sumber pemberitaannya pada pihak non militer, seperti terlihat pada tabel dua, antara lain dari pihak tokoh masyarakat sebanyak satu sumber, masyarakat sekitar lebih kurang satu sumber, kalangan LSM lebih kurang tiga sumber. Dari tabel dua juga terlihat Republika tidak mendasarkan sama sekali sumber pemberitaannya pada pihak GAM, korban yang selamat, keluarga korban, pihak mahasiswa, dan kalangan luar negeri.

Sebagaimana terlihat pada tabel satu di atas, Serambi Indonesia juga menurunkan sumber pemberitaannya dari pihak non militer seperti pada kalangan GAM sebanyak satu sumber, kalangan keluarga korban lebih kurang empat sumber, masyarakat sekitar sebanyak tujuh sumber, kalangan LSM lebih kurang dua sumber, kalangan mahasiswa lebih kurang satu sumber, dan kalangan luar negeri lebih kurang dua sumber. Dari tabel dua di atas juga terlihat Serambi Indonesia sama sekali tidak mendasarkan sumber pemberitaannya pada pihak korban yang selamat dan tokoh masyarakat.

Kontras juga mendasarkan sumber pemberitaannya pada pihak non militer, sebagaimana terlihat pada tabel dua di atas anatara lain seperti pihak GAM lebih kurang satu sumber, korban yang selamat lebih kurang satu sumber, tokoh masyarakat lebih kurang dua sumber, keluarga korban lebih kurang empat sumber, masyarakat sekitar lebih kurang tiga sumber, kalangan LSM lebih kurang dua sumber, kalangan mahasiswa lebih kurang satu sumber, dan dari kalangan luar negeri lebih kurang dua sumber. Sebagaimana terlihat pada tabel dua, dari ke empat media yang dianalisis hanya Kontras dalam pemberitaannya yang mendasarkan beritanya pada semua sumber berita yang telah disebutkan pada tabel satu di atas.

Atas kematian Bantaqiah cs tersebut, kalangan non militer yakni kalangan masyarakat sipil sebagaimana telah disebutkan di atas, menyebutkan bahwa kematian Bantaqiah cs tersebut telah terjadi karena pembantaian sepihak terhadap masyarakat sipil oleh pihak militer dan perbuatan tersebut dianggap ekstra judicial dan pelanggaran berat terhadap HAM.

Tabel Dua
Penggambaran Berita Bersarkan Sudut Pandang
Tahun 1999

	Kompas	Republika	Serambi	Kontras
Militer	Kontak Senjata	Kontak Senjata	Kontak Senjata	Kontak Senjata
Non Militer	Pembantaian	Pembantaian	Pembantaian	Pembantaian

Dalam tabel dua di atas terlihat bagaimana pihak militer mengklaim bahwa kematian Bantaqiah cs tersebut terjadi dalam suatu kontak senjata. Pihak militer berusaha menggiring publik opini kematian Bantaqiah cs tersebut pada logika kontak senjata yang berarti pihak Bantaqiah cs juga memiliki senjata dan di sana telah terjadi peperangan. Oleh karena itu wajar saja dalam suatu peperangan kalau ada yang mati. Tapi menjadi tidak wajar juga kalau yang mati hanya pihak lawan saja, pihak Bantaqiah cs, sementara dari pihak TNI tidak ada satu pun yang mati, sebagaimana tergambar dalam tabel empat di bawah ini.

Tabel Tiga
Korban Mati Dan Luka-Luka
Tahun 1999

	Kompas	Republika	Serambi	Kontras
Militer Yang Mati	x	x	x	x
Militer Yang Luka	x	x	x	x
Bantaqiah cs Yang Luka dan Mati	57	57	57	57
Bantaqiah cs Yang Luka	1	1	1	1
Jumlah	58	58	58	58

Oleh karena itu menjadi sangat wajar pula ketika pihak non militer mengatakan bahwa kematian Bantaqiah cs tersebut adalah pembantaian masyarakat sipil oleh pihak militer. Bagaimana mungkin itu bisa dikatakan sebagai sebuah kontak senjata kalau yang mati hanya satu pihak saja, sementara dari pihak militer, jangankan ada yang mati, yang tergores saja tidak ada, sebagaimana terlihat dalam tabel tiga dan tabel empat di atas.

Kembali ke tabel tiga di atas, terlihat ke empat media yang dianalisis itu telah mengkafer pemberitaannya dari dua sisi, yakni dari sudut pandang militer dan sudut pandang non militer. Namun sebagaimana terlihat pada tabel dua di atas, jumlah sumber berita dari sumber non militer lebih banyak porsinya dari sumber militer, tetapi ruang pemberitaannya lebih mendahulukan pihak militer.

6. Berita Tentang Investigasi Kematian Bantaqiah cs.

**Tabel Empat
 Sumber Berita
 Tahun 1999**

	Kompas	Republika	Serambi	Kontras
TPF	1	1	1	1
TKIPTKA	1	x	1	1
Tim Relawan	x	2	2	x
Lain-lain	1	1	x	2
Jumlah	3	4	4	4

Dalam tabel empat di atas terlihat ada beberapa pihak yang diterjunkan langsung untuk melakukan investigasi menyangkut kematian Bantaqiah cs. TPF (Tim Pencari Fakta) adalah tim bentukan Pemda Aceh untuk melakukan investigasi menyangkut kematian Bantaqiah cs. TKIPTKA (Tim Komisi Independen Pengusut Tindak Kekerasan di Aceh) adalah tim bentukan Pemerintah Pusat untuk mengusut tindak kekerasan yang terjadi di Aceh. Tim Relawan adalah tim independen yang dibentuk atas inisiatif kalangan LSM, Forum Peduli HAM, dan kalangan mahasiswa. Sementara sumber lain-lainnya adalah tanggapan perseorangan yang terdiri dari Presiden Gus Dur dan anggota DPRD.

Kompas, sebagaimana terlihat dalam tabel lima di atas, menurunkan beritanya tentang investigasi menyangkut kematian Bantaqiah cs dengan mendasarkan diri pada sumber TPF lebih kurang satu kali, pada TKIPTKA

lebih kurang satu kali, dan pada sumber yang lainnya juga lebih kurang satu kali. Sementara dari Tim Relawan Kompas tidak mengutipnya

Republika, sebagaimana terlihat dalam tabel lima di atas, juga menurunkan beritanya tentang investigasi oleh beberapa pihak menyangkut kematian Bantaqiah cs dengan mendasarkan diri pada sumber TPF sebanyak satu kali, pada Tim Relawan sebanyak dua sumber, dan pada sumber yang lainnya sabanya satu kali. Republika tidak mengambil pemberitaan tentang investigasi yang dilakukan oleh TKIPTKA.

Sebagaimana terlihat dalam tabel lima di atas, Serambi Indonesia dalam menurunkan beritanya tentang upaya investigasi yang dilakukan oleh beberapa pihak menyangkut kematian Bantaqiah cs lebih mendasarkan diri pada sumber-sumber seperti pada TPF sebanyak satu kali, pada TKIPTKA sebanyak satu kali, dan pada Tim Relawan sebanyak dua kali. Serambi Indonesia sama sekali tidak mengutip sumber pemberitaannya dari pihak yang lainnya menyangkut upaya investigasi ini.

Kontras, dalam tabel lima di atas, juga terlihat mangutip sumber pemberitaannya menyangkut upaya investigasi berbagai pihak menyangkut kematian Bantaqiah cs lebih mendasarkan diri pada sumber-sumber seperti TPF sebanyak satu kali, TKIPTKA sebanyak satu kali, dan dari sumber lainnya sebanyak dua kali. Sementara dari sumber Tim Relawan, Kontras sama sekali tidak mengutipnya.

Dari semua pihak yang telah melakukan upaya investigasi terhadap kematian Bantaqiah cs, mereka berkesimpulan, sebagaimana dikatakan oleh ke empat media yang telah dianalisis, berdasarkan bukti-bukti lapangan bahwa kematian Bantaqiah cs adalah pembantaian sepihak oleh TNI AD dan tidak terbukti sama sekali pihak Bantaqiah cs melakukan perlawanan. Tim juga berkesimpulan tidak ada bukti-bukti yang meyakinkan bahwa kelompok Bantaqiah melakukan latihan fisik ala militer dan menyimpan 100 pucuk senjata api sebagaimana diklaim oleh pihak militer. Sebagaimana tergambar dalam tabel enam di bawah ini.

Tabel Lima

Penggambaran Berita Berdasarkan Sudut Pandang
Tahun 1999

	Kompas	Republika	Serambi	Kontras
TPF	Pembantaian	Idem	Idem	Idem
TKIPTKA	Idem	Idem	Idem	Idem
Tim Relawan	Idem	Idem	Idem	Idem
Lain-lain	Idem	Idem	Idem	idem

6. Kesimpulan

Sesungguhnya tidak semua pihak memiliki akses yang cukup memadai dan seimbang untuk diberitakan dalam media massa. Kecenderungan ini terutama terjadi dalam suasana sosial politik yang sedang mengalami konflik. Kepentingan pihak status quo cenderung lebih mendominasi sisi pemberitaan oleh suatu media massa. Sementara pihak korban cenderung dirugikan oleh pemberitaan suatu media massa. Keseimbangan pemberitaan oleh suatu media massa baru terjadi biasanya setelah diberi perhatian yang lebih oleh publik terutama oleh masyarakat madani yang betul-betul konsens terhadap rasa keadilan dan korban.

Korban suatu peristiwa sosial politik mestinya tidak lagi dijadikan korban bagi pemberitaan suatu media massa. Hal ini dapat dihindari manakala suatu pemberitaan media massa lebih ditekankan pada obyektifitas pemberitaan yang didasarkan pada metode media investigasi dan jurnalisme kritis.

Daftar Pustaka.

Agus Sudiby; 1999; Citra Bung Karno Analisis Berita Pers Orde Baru, Bigraf Publishing; Yogyakarta.

_____ ; 2001; Politik Media dan Pertarungan Wacana, LKIS; Yogyakarta.

Amran Zamzami; 2001; Tragedi Anak Bangsa Pembantaian Teungku Bantaqiah dan Santri-Santrinya, Bina Rena Pariwisata; Jakarta.

Ana Nadhya Abrar; 1998; Pelecehan dan Kekerasan Seksual Analisis Isi Surat Kabar Indonesia, PPK UGM; Yogyakarta.

Asahadi Siregar; 1992; Pers (laporan Penelitian); Fisipol UGM, Yogyakarta

-----; 1999; Kebebasan Pers dan Media Watch; Pantau, Jakarta

Eriyanto; 1999; Militerisasi Kosakata, dalam Majalah Pantau; Jakarta.

-----; 1999; Media Sangat Tergantung Sumber Militer; Pantau, Jakarta.

Heru Nugroho; 2000; Menumbuhkan Ide-Ide Kritis; Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----dkk; 2002; Pemetaan Dan Model Resolusi konflik Aceh; Sosiologi UGM, Laporan penelitian RUI-LIPI.

Ignas Kleden; 1987; Dalam Pengantar Perspektif Pers Indonesia Oleh Jacob Oetomo, Gramedia; Jakarta.

Jakob Oetama; 1987; Perspektif Pers Indonesia; LP3ES, Jakarta.

Lambang Trijono; 2002; Peran komunikasi dalam Konflik dan Untuk Perdamaian, dalam Media-Militer-Politik, Lukas S Ispandriarno dkk, Galang Press; Yogyakarta.

Martin Leoffelholz; 2002; *Crisis Communication: Apa Yang Kita Ketahui dan Apa yang Belum Kita Ketahui dalam Media, Militer, Politik* oleh Lukas S. dkk, Galang Press; Yogyakarta.

Rizal Mallarangeng; 1990; *Etika Pers Indonesia*; Fisipol UGM, Yogyakarta.

Koran dan Tabloit

Kompas, Periode Juli 1999-Mei 2000 Yang Berkaitan Dengan Tragedi Bantaqiah.

Republika, Periode Juli 1999-Mei 2000 Yang Berkaitan Dengan Tragedi Bantaqiah.

Serambi Indonesia, Periode Juli 1999-Mei 2000 Yang Berkaitan Dengan Tragedi Bantaqiah.

Kontras, Periode Juli 1999-Mei 2000 Yang Berkaitan Dengan Tragedi Bantaqiah

OOOOO